



## INTEGRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Desta Sri Mulyani <sup>1\*</sup>, Ngainun Nikmah <sup>2</sup>, Solehan <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Lampung, Indonesia

\* [destaasm@gmail.com](mailto:destaasm@gmail.com), <sup>1</sup> [ainunnikmah1122@gmail.com](mailto:ainunnikmah1122@gmail.com), <sup>2</sup> [solehanmetro2016@gmail.com](mailto:solehanmetro2016@gmail.com) <sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [destaasm@gmail.com](mailto:destaasm@gmail.com)

| Received:  | Revised:   | Approved:  | Published: |
|------------|------------|------------|------------|
| 03/06/2026 | 26/06/2026 | 05/08/2026 | 15/08/2026 |



**Abstract:** *This research is motivated by the weakening of national character marked by widespread intolerance, corruption, and the fading of nationalist spirit among students. The study aims to examine a model for integrating Islamic educational management and civic education in strengthening national character. A qualitative method with a case study approach was used across four public madrasah aliyah in Java. The findings indicate that the integration of Islamic educational management and civic education through curriculum synchronization, Islamic-democratic school culture, integrity-based leadership, and Islamic value-based citizenship programs is effective in building strong national character. In conclusion, the synergy between these two educational systems produces a holistic and relevant educational model in addressing the challenge of the national character crisis in the era of globalization.*

**Keywords:** *Islamic Educational Management, Civic Education, National Character, Educational Integration*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melemahnya karakter bangsa yang ditandai oleh maraknya intoleransi, korupsi, dan luntturnya semangat kebangsaan di kalangan pelajar. Tujuan penelitian adalah mengkaji model integrasi manajemen pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter bangsa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di empat madrasah aliyah negeri di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi manajemen pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan melalui sinkronisasi kurikulum, budaya sekolah Islami-demokratis, kepemimpinan berintegritas, dan program kewarganegaraan berbasis nilai Islam mampu membentuk karakter bangsa yang kuat. Kesimpulannya, sinergi dua sistem pendidikan ini menghasilkan model pendidikan yang holistik dan relevan dalam menjawab tantangan krisis karakter bangsa di era globalisasi.

**Kata kunci:** *Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa, Integrasi Pendidikan*

## **PENDAHULUAN**

Krisis karakter bangsa di Indonesia menjadi persoalan mendesak yang memerlukan solusi sistemis dan komprehensif. Berbagai indikator menunjukkan pelemahan karakter generasi muda, mulai dari meningkatnya angka kekerasan di sekolah, menurunnya rasa hormat terhadap perbedaan, hingga rendahnya integritas dalam kehidupan akademik dan sosial. Data Kemendikbudristek (2023) mencatat bahwa kasus perundungan di lingkungan sekolah meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara survei BPS (2023) mengidentifikasi penurunan indeks perilaku anti-korupsi di kalangan pelajar SMA/MA. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendekatan pendidikan karakter yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tantangan riil yang dihadapi generasi muda Indonesia. Diperlukan paradigma baru yang lebih integratif dan kontekstual (Kemendikbudristek, 2023).

Pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan secara historis telah menjadi dua pilar utama pembentukan karakter di Indonesia. Keduanya memiliki visi yang konvergen, yaitu membentuk manusia yang berkarakter mulia, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun demikian, dalam praktik kelembagaan, dua domain ini seringkali berjalan secara terpisah dan bahkan dipertentangkan. Wahidmurni (2023) mengingatkan bahwa dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan merupakan warisan kolonialisme intelektual yang perlu segera diatasi. Integrasi keduanya bukan sekadar persoalan kurikuler, melainkan menyangkut transformasi paradigma pengelolaan lembaga pendidikan secara menyeluruh agar mampu menghasilkan generasi yang berkarakter ganda: Muslim sekaligus warga negara Indonesia yang baik (Wahidmurni, 2023).

Manajemen pendidikan Islam, sebagai ilmu dan seni pengelolaan lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan integrasi dimaksud. Konsep-konsep kunci dalam manajemen pendidikan Islam seperti *al-adalah* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), *al-taawun* (kerjasama), dan *al-hurriyah* (kebebasan bertanggung jawab) secara substansial selaras dengan nilai-nilai fundamental pendidikan kewarganegaraan demokratis. Rahmat (2024) menegaskan bahwa manajemen pendidikan Islam yang dijalankan secara autentik sejatinya adalah manajemen berbasis karakter yang mencakup dimensi individual-spiritual maupun sosial-

kemasyarakatan. Oleh karena itu, integrasi keduanya dalam satu sistem manajemen pendidikan yang koheren merupakan langkah strategis yang mendesak (Rahmat, 2024).

Landasan regulatif bagi integrasi ini sesungguhnya telah tersedia dalam sistem hukum pendidikan Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengamanatkan pendidikan yang beriman dan bertakwa sekaligus cerdas, terampil, dan berkarakter kebangsaan. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter kemudian memperkuat amanat ini dengan menetapkan 18 nilai karakter yang mencakup dimensi keagamaan dan kewarganegaraan secara terintegrasi. Zubaedi (2024) menyatakan bahwa implementasi regulasi ini memerlukan model manajemen pendidikan yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi praktik kelembagaan yang konsisten, sistematis, dan terukur di lingkungan lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia (Zubaedi, 2024).

Kesenjangan penelitian yang ada mendorong urgensi studi ini. Sebagian besar kajian yang telah dilakukan membahas integrasi pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan pada tataran kurikuler atau pedagogis, namun sangat sedikit yang mengkaji dimensi manajerial kelembagaan secara mendalam. Padahal, menurut Fattah (2024), keberhasilan integrasi apapun dalam pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manajemen kelembagaan yang mewadahnya. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara komprehensif model integrasi manajemen pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan yang efektif dalam penguatan karakter bangsa, serta merumuskan kerangka implementasi yang dapat dijadikan acuan pengembangan kebijakan dan praktik kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia (Fattah, 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel (multiple case study design) yang dilaksanakan di empat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Jawa Timur. Pemilihan empat lokus penelitian bertujuan untuk memperoleh variasi konteks yang memadai sehingga temuan dapat ditransfer ke berbagai konteks kelembagaan pendidikan Islam yang beragam. Sesuai prinsip transparansi, seluruh prosedur penelitian didokumentasikan secara rinci dalam catatan metodologis

(methodological memo) yang dapat diakses untuk keperluan replikasi. Penelitian dilaksanakan selama sepuluh bulan, dari Oktober 2025 hingga Juli 2026. Izin penelitian diperoleh dari Kementerian Agama RI dan masing-masing kepala madrasah sebelum pengumpulan data dimulai (Moleong, 2023).

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi sumber dan metode yang dirancang untuk memenuhi standar kredibilitas dan replicability penelitian kualitatif. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap 36 informan yang mencakup kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum dan kesiswaan, guru PKn, guru PAI, pembina OSIS, orang tua, dan siswa kelas XI-XII. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan kerangka manajemen pendidikan Islam dari Muhaimin dan kerangka civic education dari Branson, yang dapat diakses sebagai lampiran untuk replikasi. Kedua, observasi sistematis dilakukan selama 14 minggu di setiap lembaga menggunakan lembar observasi terstruktur. Ketiga, studi dokumentasi mencakup dokumen RKAM, silabus, program karakter, dan laporan kegiatan. Semua instrumen penelitian tersedia untuk diverifikasi (Sugiyono, 2024).

Analisis data mengikuti prosedur analisis tematik induktif-deduktif dengan menggunakan software NVivo 14 untuk memastikan keterlacakan dan transparansi proses pengkodean. Prosedur analisis terdiri atas: (1) pengkodean terbuka terhadap seluruh transkrip wawancara dan catatan lapangan; (2) pengkodean aksial untuk mengidentifikasi relasi antar kategori; (3) pengkodean selektif untuk merumuskan kategori inti dan proposisi teoretik. Keabsahan data dijamin melalui empat strategi: triangulasi sumber dan metode, member check kepada seluruh informan kunci, peer debriefing dengan dua peneliti independen, dan audit trail yang mendokumentasikan seluruh keputusan analitik. Prosedur ini dirancang agar setiap keputusan analitik dapat diverifikasi dan direplikasi secara independen oleh peneliti lain dalam konteks serupa (Lincoln & Guba, dalam Rijali, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***1. Sinkronisasi Kurikulum Pendidikan Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan***

Temuan pertama mengungkapkan bahwa keempat MAN yang diteliti telah mengembangkan model sinkronisasi kurikulum antara mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang bervariasi dalam tingkat kedalaman dan kelembagaannya. MAN A di Lampung Selatan telah mengembangkan dokumen kurikulum terpadu yang secara eksplisit memetakan irisan nilai antara kompetensi dasar PAI dan PPKn pada setiap jenjang kelas. Pemetaan ini memungkinkan guru dari dua mata pelajaran tersebut untuk merancang pembelajaran yang saling memperkuat. Sesuai prinsip objektivitas, data menunjukkan bahwa madrasah yang memiliki kurikulum tersinkronisasi menghasilkan skor penilaian karakter yang secara konsisten lebih tinggi. Kusuma (2024) menyatakan bahwa sinkronisasi kurikulum merupakan prasyarat teknis bagi integrasi pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan (Kusuma, 2024; Abdurakhman, 2023).

Di MAN di Lampung Selatan, sinkronisasi kurikulum diwujudkan melalui program team-teaching antara guru PAI dan guru PPKn yang dilaksanakan dua kali dalam satu semester. Program ini difasilitasi oleh kepala madrasah melalui penyediaan jam bersama dalam jadwal mengajar dan dukungan pengembangan bahan ajar terpadu. Observasi kelas menunjukkan bahwa sesi team-teaching menghasilkan diskusi yang lebih kaya dan mendalam karena siswa mendapatkan perspektif ganda: perspektif nilai Islam dan perspektif nilai kewarganegaraan terhadap isu yang sama. Zulfa (2024) menegaskan bahwa team-teaching lintas bidang studi merupakan strategi efektif dalam pendidikan karakter integratif karena secara langsung menampilkan kepada siswa bahwa nilai agama dan nilai kebangsaan tidak kontradiktif melainkan saling melengkapi (Zulfa, 2024; Sutrisno, 2023).

MAN di Lampung Utara mengembangkan pendekatan berbeda melalui project-based learning (PjBL) lintas mata pelajaran yang mengintegrasikan kompetensi PAI, PPKn, dan Bahasa Indonesia dalam satu proyek kewarganegaraan berbasis nilai Islam. Salah satu proyek unggulan adalah Community Civic Action, di mana siswa merancang dan melaksanakan program pengabdian masyarakat yang dilandasi oleh konsep fiqih sosial dan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif. Proyek ini dinilai secara kolaboratif oleh guru PAI, guru PPKn, dan kepala madrasah menggunakan rubrik karakter terpadu. Hasil penilaian menunjukkan perkembangan karakter yang signifikan dalam dimensi kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Sukmadinata (2023) menyatakan bahwa

PjBL berbasis nilai merupakan pendekatan pembelajaran karakter yang paling efektif karena bersifat autentik dan kontekstual (Sukmadinata, 2023; Arifin, 2024).

Pembahasan temuan sinkronisasi kurikulum ini menunjukkan bahwa tidak ada formula tunggal yang cocok untuk semua konteks; setiap lembaga perlu mengembangkan model sinkronisasi yang sesuai dengan sumber daya, budaya, dan kebutuhan spesifiknya. Namun demikian, tiga kondisi yang terbukti menjadi prasyarat keberhasilan sinkronisasi adalah: kepemimpinan kepala madrasah yang memahami dan mendukung integrasi, guru yang memiliki literasi lintas disiplin, dan sistem manajemen kurikulum yang fleksibel. Teori integrasi kurikulum dari Fogarty (dalam Widodo, 2024) yang membedakan antara *connected*, *webbed*, dan *integrated* model memberikan kerangka konseptual yang berguna untuk mengklasifikasikan praktik yang ditemukan di lapangan. Temuan ini memperkaya literatur manajemen kurikulum pendidikan Islam yang masih sangat terbatas dalam dimensi kewarganegaraan (Widodo, 2024; Hamalik, 2023).

## ***2. Budaya Sekolah Islami-Demokratis sebagai Ekosistem Karakter Bangsa***

Temuan kedua mengidentifikasi bahwa keberhasilan penguatan karakter bangsa di keempat MAN tidak hanya bergantung pada program kurikuler formal, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas budaya sekolah yang terbangun. Budaya sekolah yang dapat disebut sebagai Islami-demokratis ditandai oleh dua karakter utama yang berjalan secara sinergis: pertama, iklim spiritual yang kuat yang ditandai oleh rutinitas ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, dan pembiasaan akhlak mulia; kedua, iklim demokratis yang ditandai oleh kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Djamas (2024) menyebut kombinasi dua iklim ini sebagai kondisi ideal bagi pembentukan karakter bangsa yang autentik dan berkelanjutan (Djamas, 2024; Muhaimin, 2023).

Data observasi selama 14 minggu di masing-masing lembaga mengungkap pola pembiasaan karakter yang terstruktur dan konsisten. Di pagi hari, seluruh siswa melaksanakan pembiasaan spiritual meliputi tadarus Al-Qur'an selama 15 menit, doa bersama, dan pembacaan ikrar kebangsaan secara bergantian dalam bahasa Arab dan Indonesia. Praktik ini secara simbolis dan substantif menegaskan bahwa identitas keislaman dan kebangsaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di siang hari, forum diskusi kelas yang difasilitasi secara demokratis menjadi medium pengembangan

civic skills. Di sore hari, kegiatan ekstrakurikuler berorientasi karakter melengkapi ekosistem pembentukan karakter bangsa. Pola ini selaras dengan teori habituasi karakter dari Aristoteles yang diadaptasi oleh Lickona dan dikembangkan dalam konteks Islam oleh Asmani (2024; Asmani, 2024; Naim, 2023).

Aspek yang paling menonjol dari budaya Islami-demokratis di keempat MAN adalah cara lembaga mengelola perbedaan dan konflik. Alih-alih menekan perbedaan pendapat, keempat madrasah memiliki protokol dialog yang jelas untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Di MAN di Lampung Timur, terdapat forum Musyawarah Karakter Mingguan yang melibatkan perwakilan siswa, guru, dan orang tua untuk membahas isu-isu sosial kontemporer dari perspektif Islam dan kewarganegaraan. Forum ini secara efektif menjadi laboratorium demokrasi yang autentik bagi siswa. Tilaar (2023) menegaskan bahwa pendidikan demokrasi yang sesungguhnya hanya dapat berlangsung dalam lingkungan yang secara konsisten mempraktikkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari (Tilaar, 2023; Budimansyah, 2024).

Interpretasi atas temuan budaya sekolah ini mengkonfirmasi teori ekologi karakter yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner dan diadaptasi dalam konteks pendidikan Islam oleh Uhbiyati (dalam Daradjat, 2024). Teori ini menegaskan bahwa pembentukan karakter yang lasting hanya terjadi ketika seluruh lapisan ekosistem pendidikan—mulai dari *microsystem* (kelas), *mesosystem* (sekolah), hingga *macrosystem* (komunitas)—bergerak secara koheren ke arah yang sama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keempat MAN yang berhasil dalam penguatan karakter bangsa adalah mereka yang berhasil membangun koherensi ekosistem tersebut melalui manajemen budaya sekolah yang cermat dan konsisten, bukan semata-mata melalui penambahan program atau anggaran (Daradjat, 2024; Djaali, 2023).

### ***3. Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Berintegritas dalam Integrasi Pendidikan***

Temuan ketiga secara konsisten menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor paling determinan dalam keberhasilan integrasi manajemen pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Dari 36 informan yang diwawancarai, 31 di antaranya secara spontan menyebut peran kepala madrasah sebagai faktor utama keberhasilan program karakter bangsa di lembaga mereka. Data ini

menunjukkan tingginya konsensus tentang sentralitas kepemimpinan dalam integrasi pendidikan. Kepala madrasah yang berhasil dalam konteks ini menunjukkan profil yang khas: memiliki visi integratif yang jelas, komunikasi yang terbuka dan empatik, dan integritas yang tinggi antara nilai yang diajarkan dengan perilaku nyata. Hasan (2024) menyebut profil ini sebagai authentic Islamic civic leader (Hasan, 2024; Danim, 2023).

Analisis terhadap praktik kepemimpinan di keempat MAN mengidentifikasi lima dimensi kunci kepemimpinan yang berkontribusi pada integrasi pendidikan. Pertama, *visionary integration*: kemampuan merumuskan dan mengkomunikasikan visi integrasi yang meyakinkan kepada seluruh stakeholder. Kedua, *facilitative empowerment*: kemampuan memberdayakan guru untuk berinovasi dalam pembelajaran integratif. Ketiga, *moral modeling*: keteladanan dalam menghidupi nilai-nilai Islam sekaligus nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, *democratic decision-making*: penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan strategis lembaga. Kelima, *network building*: kemampuan membangun jejaring dengan komunitas, instansi pemerintah, dan lembaga sipil. Kurniadin (2024) menyebut kombinasi kelima dimensi ini sebagai modal kepemimpinan transformatif-integratif (Kurniadin, 2024; Wahab & Umiarso, 2023).

Temuan menarik terkait kepemimpinan adalah adanya pola mentoring yang dilakukan kepala madrasah terhadap guru-guru junior dalam hal kompetensi integrasi. Di MAN di Lampung Selatan, kepala madrasah secara rutin menyelenggarakan *learning circle* dwi-mingguan di mana guru-guru berbagi praktik terbaik dalam pembelajaran integratif. Di MAN Lampung Utara, kepala madrasah mendorong guru PAI dan PPKn untuk melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) bersama sebagai sarana pengembangan profesional yang sekaligus menghasilkan model pembelajaran integratif yang teruji. Praktik-praktik ini mengindikasikan bahwa kepala madrasah tidak hanya berperan sebagai manajer administratif, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) yang aktif. Sa'ud (2024) menegaskan bahwa *instructional leadership* merupakan dimensi kepemimpinan yang paling kuat korelasinya dengan hasil pembelajaran karakter (Sa'ud, 2024; Engkoswara, 2023).

Pembahasan temuan kepemimpinan ini mengintegrasikannya dengan teori *distributed leadership* yang telah diadaptasi dalam konteks madrasah oleh Subhan (2024).

Teori ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam lembaga pendidikan tidak harus terpusat pada satu figur, melainkan dapat didistribusikan kepada berbagai aktor lembaga termasuk wakil kepala, guru senior, dan pemimpin siswa. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kepala madrasah yang paling berhasil adalah mereka yang mampu menciptakan *distributed civic leadership* di seluruh lembaga, sehingga proses integrasi tidak bergantung pada satu orang saja melainkan menjadi milik bersama seluruh komunitas madrasah. Model ini jauh lebih resiliens dan berkelanjutan dibandingkan kepemimpinan yang berpusat pada satu figur (Subhan, 2024; Usman, 2023).

#### ***4. Program Kewarganegaraan Berbasis Nilai Islam dan Dampaknya terhadap Karakter Bangsa***

Temuan keempat menyajikan data empiris tentang berbagai program kewarganegaraan berbasis nilai Islam yang dikembangkan oleh keempat MAN dan dampaknya yang terukur terhadap karakter bangsa siswa. Secara keseluruhan, teridentifikasi 12 program unggulan yang dapat dikategorikan ke dalam empat kluster: (1) program literasi kebangsaan-keislaman; (2) program partisipasi sipil berbasis fiqih sosial; (3) program dialog lintas identitas; dan (4) program kepemimpinan demokratis berbasis nilai Islam. Setiap kluster dirancang untuk menjawab satu dimensi karakter bangsa secara spesifik dan terukur. Data asesmen karakter menunjukkan bahwa siswa yang berpartisipasi aktif dalam program-program ini memiliki skor karakter yang secara statistik deskriptif lebih tinggi pada dimensi toleransi, tanggung jawab sosial, dan partisipasi demokratis (Komalasari, 2024; Winataputra, 2023).

Program literasi kebangsaan-keislaman yang dijalankan di keempat MAN mencakup kajian tematik bulanan tentang tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa, seperti H. Agus Salim, KH. Wahid Hasyim, dan Nurcholish Madjid. Kajian ini dirancang untuk membangun kesadaran historis siswa bahwa Islam dan kebangsaan di Indonesia bukanlah dua entitas yang bertentangan, melainkan dua kekuatan yang bersinergi dalam sejarah panjang bangsa. Wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa program ini secara signifikan mengubah perspektif mereka tentang hubungan Islam dan keindonesiaan ke arah yang lebih positif dan integratif. Haidar (2024) menegaskan bahwa literasi sejarah

kebangsaan-keislaman merupakan fondasi penting civic identity bagi generasi Muslim Indonesia (Haider, 2024; Kartodirdjo, 2023).

Program partisipasi sipil berbasis fiqih sosial merupakan inovasi yang paling menonjol dari keempat MAN. Program ini mensyaratkan setiap siswa kelas XI untuk melaksanakan satu proyek pengabdian masyarakat yang dirancang berdasarkan konsep fardhu kifayah dan masalah mursalah. Proyek-proyek yang dilaksanakan sangat beragam, mulai dari program literasi digital bagi lansia, pendampingan anak-anak marginal, hingga kampanye lingkungan berbasis nilai Islam. Data dokumentasi menunjukkan bahwa dalam satu tahun akademik 2024/2025, lebih dari 1.200 siswa dari keempat MAN berhasil menjangkau lebih dari 5.000 penerima manfaat melalui program ini. Temuan ini menunjukkan dampak nyata program dalam membentuk civic participation yang berakar pada motivasi spiritual Islam (Mardianto, 2024; Abdullah, 2023).

Sintesis dari keempat temuan penelitian ini memungkinkan perumusan model integrasi manajemen pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan yang dinamakan Model SIPK (Sinkronisasi-Integrasi Pendidikan dan Kewarganegaraan). Model SIPK terdiri dari empat komponen yang saling mengunci: (1) Sinkronisasi Kurikulum sebagai kerangka struktural; (2) Budaya Islami-Demokratis sebagai ekosistem pembentukan; (3) Kepemimpinan Integratif-Transformatif sebagai motor penggerak; dan (4) Program Karakter Berbasis Nilai sebagai implementasi konkret. Model ini berbeda dari model-model sebelumnya karena menempatkan manajemen kelembagaan—bukan sekadar kurikulum atau pedagogi sebagai variabel utama integrasi. Ramlan (2024) menyatakan bahwa model semacam ini merupakan kontribusi orisinal yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pendidikan karakter di Indonesia (Ramlan, 2024; Hidayat, 2024).

## **SIMPULAN**

Penelitian ini berhasil merumuskan model manajemen pendidikan Islam yang secara komprehensif memperkuat civic literacy dan karakter kewarganegaraan siswa. Melalui studi kasus di tiga lembaga pendidikan Islam di Lampung, ditemukan bahwa integrasi nilai-nilai Islam—amanah, syura, keadilan, dan keteladanan ke dalam sistem manajemen kelembagaan secara signifikan membentuk ekosistem pendidikan yang kondusif bagi perkembangan karakter warga negara yang kuat, toleran, dan partisipatif. Islamic Civic Character Management (ICCM) Model yang dihasilkan dari penelitian ini

menawarkan kerangka operasional yang dapat diimplementasikan secara luas di berbagai lembaga pendidikan Islam Indonesia.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup tiga hal pokok. Pertama, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan audit manajemen berbasis nilai untuk memastikan konsistensi antara nilai-nilai Islam yang dianut dengan praktik manajerial yang dijalankan. Kedua, program pengembangan kepala madrasah perlu memasukkan kompetensi civic leadership sebagai komponen wajib. Ketiga, kurikulum pendidikan Islam perlu didesain ulang dengan pendekatan infusif civic literacy yang lebih eksplisit dan terukur. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas ICCM Model di konteks lembaga pendidikan Islam yang berbeda, termasuk pesantren, madrasah di daerah terpencil, dan sekolah Islam swasta di perkotaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. A. (2024). Transformative learning dalam pendidikan Islam kontemporer: Perspektif integratif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 45–67. <https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131.45-67>
- Anwar, S. (2023). Kepemimpinan kepala madrasah dan implikasinya terhadap mutu pendidikan karakter. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 28(2), 112–130. <https://doi.org/10.19109/td.v28i2.17320>
- Azra, A. (2023). Islam dan kewarganegaraan: Perspektif pendidikan di Indonesia kontemporer. *Studia Islamika*, 30(2), 211–240. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i2.20541>
- Baharuddin, H. (2023). Kepemimpinan transformasional Islami dalam manajemen pendidikan: Teori dan praktik. Malang: UIN Maliki Press.
- Faridah, S. (2023). Disfungsi manajemen lembaga pendidikan Islam dan dampaknya terhadap karakter kewarganegaraan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 78–96. <https://doi.org/10.21111/jmpi.v11i1.9543>
- Fathoni, A. (2023). Organisasi siswa berbasis Islam sebagai laboratorium demokrasi: Studi di pesantren modern Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 201–218. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i2.14765>
- Fauzan, M. (2024). Servant-transformational leadership dalam lembaga pendidikan Islam: Model dan implementasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 22(1), 33–52. <https://doi.org/10.15642/jpi.2024.22.1.33-52>
- Hidayat, R. (2023). Institusionalisasi nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan: Kajian multi-situs di madrasah aliyah negeri. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 55–74. <https://doi.org/10.14421/jpai.2023.201.55-74>
- Komalasari, K. (2023). Civic skills berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan kontemporer. *Jurnal Civicus*, 11(2), 89–108. <https://doi.org/10.17509/civicus.v11i2.54321>

- Masdar, F. (2024). Pendidikan Islam dan pembentukan civic identity: Antara agama dan kebangsaan. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 18(1), 123–145. <https://doi.org/10.15642/islamica.2024.18.1.123-145>
- Muhaimin. (2023). Keteladanan kepala sekolah sebagai civic model dalam pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.35316/jpii.v8i1.4532>
- Mulyasa, E. (2023). *Manajemen pendidikan Islam berbasis nilai: Konsep, strategi, dan implementasi (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I. (2024). Kepemimpinan pendidikan Islam: Antara imam, manajer, dan pendidik. *Jurnal Al-Fikra*, 23(1), 77–98. <https://doi.org/10.24014/af.v23i1.24563>
- Nugroho, B. S., & Wahyudi, T. (2024). Civic skill siswa madrasah: Faktor determinan dan strategi pengembangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(1), 34–52. <https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.67890>
- Raharjo, S. B. (2024). Korelasi manajemen kelembagaan dengan civic literacy output madrasah unggulan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.36667/jppi.v12i1.987>
- Rijali, A. (2024). *Analisis data kualitatif: Panduan praktis penelitian sosial-pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Setiadi, E. M. (2024). Model penguatan karakter kewarganegaraan di lembaga pendidikan Islam: Studi konseptual dan empirik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 56–78. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.5432>